



# Perolehan Pajak DKI Berjalan Lamban

## Instansi Terkait Diminta Sinkronisasi Data

**PADA** triwulan pertama 2015, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta hanya mengumpulkan sebesar Rp 6 triliun yang berasal dari 13 jenis pajak. Perolehan tersebut semestinya ditingkatkan secara maksimal. Mengingat Pemprov DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sebesar Rp 38,379 triliun di 2015.

Anggota Dewan Presidium Jakarta Budget Watch (JBW) Nurmansjah Lubis mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan yang diharapkan, Dinas Pajak wajib melaksanakan sinkronisasi data.

Menurut dia, persoalan krusial di instansi tersebut salah satunya lantaran data dinas dan wajib pajak yang belum sinkron. "Misalnya data pajak hotel dan restoran. Sejauh ini belum ada data yang pasti, meliputi jumlah kamar hotel, jumlah restoran. Akibatnya hasil pendapatan dari sektor itu tidak bisa dimaksimalkan," ujar Nurmansjah, kemarin.

Pria yang juga berprofesi sebagai akuntan itu menilai, Dinas Pajak DKI ke depan perlu menjalankan langkah strategis untuk meningkatkan perolehan pajak, khususnya dari pengoptimalan pajak restoran.

Saat ini, pengusaha restoran yang menggunakan sistem online baru 3.000-an wajib pajak. Itupun masih campuran dari pengusaha hotel, restoran dan hiburan. "Harus ada progres penggunaan sistem online ini. Misalnya 2.000 sampai 3.000 wajib pajak per tahun dalam menggunakan sistem online. Kalau saat ini, terus terang saya belum melihat progres tersebut di Dinas Pajak," terang dia.

Pemasangan mesin online pada setiap

restoran diharapkan bisa menjangkit sedikitnya 10 ribuan wajib pajak. Sedangkan rencana dinas untuk mewajibkan pengusaha membeli mesin dengan cara kredit harus dibatalkan. Karena hal tersebut akan berpotensi membebani pengusaha restoran meskipun pembelian itu dengan cara mencicil.

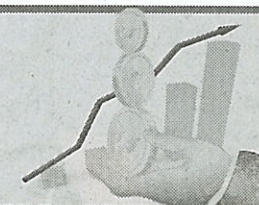
"Ilustrasinya kalau pemerintah meminjamkan mesin debit pajak online dengan harga Rp 7 juta per unit, namun bisa menghasilkan Rp 30 juta tiap bulannya dari restoran yang beromset Rp. 300 juta per bulan, saya pikir tidak akan masalah. Karena hitungan per tahun bisa mencapai Rp 3,5 triliun. Toh mesin itu hanya dipinjamkan, dan bisa ditarik sewaktu-waktu apabila restoran tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Mesin itu tetap menjadi aset milik Pemprov DKI," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, kini terus menyoroti kinerja Dinas Pajak DKI Jakarta. Bahkan gubernur meminta agar tidak ada lagi aparaturnya di instansi tersebut yang bermain-main dalam menjalankan tugas. "Saya tidak segan-segan memecat mereka yang masih main-main," tandas dia. **(wok)**



DOK/INDOPOS

Nurmansjah Lubis



**HASIL KAJIAN  
TERHADAP DINAS  
PAJAK DKI JAKARTA**

- **Harus optimalisasi pajak online pada setiap wajib pajak**
  - Khususnya pengusaha restoran
- **Harus menyediakan fasilitas mesin pajak online bagi pengusaha restoran**
- **Diperlukan kampanye agar masyarakat meminta bon pembayaran yang sudah terporporasi (sudah ada bukti pajak pada kertas bon), usai makan di restoran**
  - Bisa terlihat restoran bersangkutan

- bayar pajak atau tidak
- Masyarakat ikut mengawasi
- **Instansi terkait harus perbaharui data (update) wajib pajak**
  - Ditengarai banyak wajib pajak yang belum terdata
- **Dinas Pajak harus menambah Sumber Daya Manusia (SDM)**
  - Untuk menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya